

COMPANY PROFILE

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

- Construction
- General Trading
- Services for the Installation of Electric Power for Buildings and Factorie
- Galvalum Manufacture

Kav. Industri Ds. Bogem RT.03 RW.01, Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo
Telp. / Fax. 031-8832085 / Hp. 0812-3085-4055
Email. alkantarajayakonstruksi@gmail.com



DAFTAR ISI

- **DAFTAR ISI.....**
- **PRAKATA.....**
- **BIODATA PERUSAHAAN.....**
- **STRUKTUR ORGANISASI.....**
- **PENGALAMAN KERJA.....**
- **NERACA PERUSAHAAN.....**
- **DAFTAR PERALATAN.....**
- **LEGALITAS PERUSAHAAN.....**
- ***DOKUMENTASI PROYEK.....***

PRAKATA

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI saat ini telah banyak menangani proyek - proyek pembangunan gedung, jalan, saluran, dan lain-lain.

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI terdiri dari tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman untuk menangani beberapa kegiatan pembangunan khususnya pada Bidang Usaha Konstruksi.

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI selalu mengembangkan pola hubungan kerja sama jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan owner, rekan dan mitra kerja. Permasalahan yang timbul dalam setiap jenis pekerjaan selalu berbeda, maka pola-pola management yang fleksibel merupakan pilihan utama dari PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI untuk digunakan diberbagai model proyek.

Demikian ungkapan awal dari kami dengan harapan dapat merupakan awal jalinan kerja sama antara perusahaan kami dengan instansi yang bapak pimpin karena bagaimanapun juga kesempatan peluang tersebut tetap kami dambakan.

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

M. BAGUS ISWANTO

DIREKTUR UTAMA

BIODATA PERUSAHAAN

AKTA

Nama Perusahaan : PT. ALKANTARA KAYA KONSTRUKSI

Nomor : 03

Tanggal : 29 Januari 2018

Notaris : LENNY HERINA ONG, SH.

NPWP

Nomor : 84.349.180.4-603.000

SPPKP (SURAT PENGUKUHAN KENA PAJAK)

Nomor : S-777PKP/WPJ.24/KP.0103/2018

SIUP (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN)

Nomor : 9120006512692

Tanggal diterbitkan : 29 Mei 2019

DikeluarkanOleh : OSS

IUJK (IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI)

Nomor : 9120006512692

Tanggal diterbitkan : 29 Mei 2019

DikeluarkanOleh : OSS



NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)

Nomor : 9120006512692

Tanggal diterbitkan : 29 Mei 2019

DikeluarkanOleh : OSS

DOMISILI

Nomor : 145/65/438.7.10.1/2018

Tanggal : 30 Januari 2018

DikeluarkanOleh : SEKERTARIS DESA KEBONAGUNG

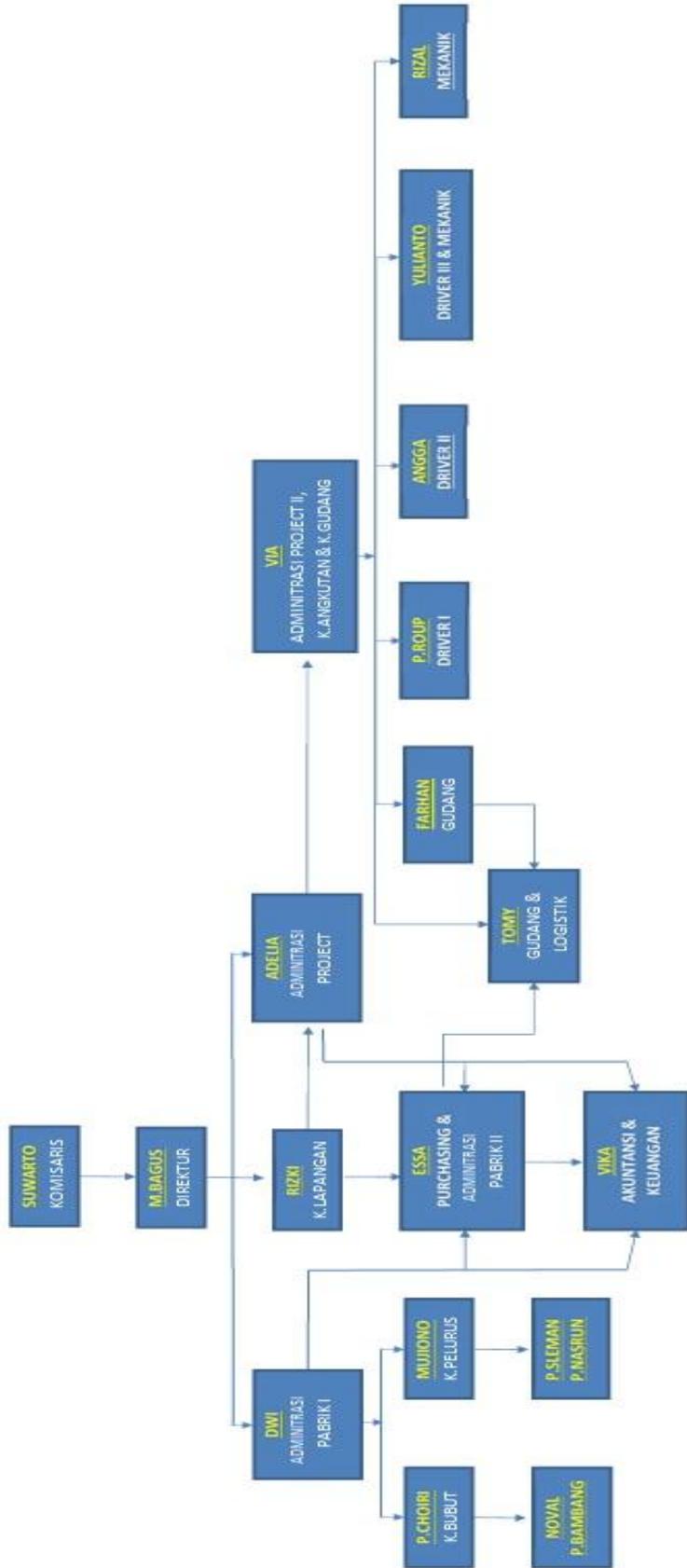
PENGALAMAN KERJA PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI :

- Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas milik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
- Pembangunan Pagar Harmonik Lapangan Sepak Bola Waru Gunung
- Pekerjaan Atap Baja & Plafond SD Nurul Fikri Saimbang, Sidoarjo
- Pemasangan Alumunium Foil untuk Atap TK NurulFikri, Graha Asri, Sidoarjo
- Pekerjaan Rangka Baja di Gresik Kota Baru Cluster Jawa Indah
- Pekerjaan Atap Balai RT Sekardangan, Sidoarjo
- Pekerjaan Plafond Dispenda Surabaya
- Pemasangan Plafond & Kanopi SMAN 6 Surabaya
- Pembangunan Gedung Type C Kantor Kelurahan Jemur Wonosari
- Proyek Atap Galvalum Kantor Urusan Agama Jl. Tambak Dalam Baru
- Proyek Perbaikan Pagar Kawat Harmonika & Rangka Ring Basket SMAN 11 Surabaya
- Proyek Pekerjaan Pagar Harmonika Lapangan Futsal Medokan Ayu
- Pembangunan Gedung UPTD Babat Jerawat
- Pembangunan Gedung Sekolah SDN DukuhKupang
- Pekerjaan Atap KUA Bangkalan
- Pekerjaan Rangka & Penutup Atap Pasar Bratang
- Pekerjaan Atap Gedung UPT-Tekkomdik Surabaya
- Pembuatan Gudang Barang Asrama Putra UNAIR
- Pembangunan Gedung Type C Kelurahan Ketabang

- 
- Pekerjaan Atap Area Parkir Gedung Teknik UPHT PLTU Gresik
 - Pembangunan Gedung Koperasi PJB Gresik
 - Rehabilitasi Halaman dan Taman Kantor Koperasi PJB Gresik
 - Pekerjaan Atap Kelurahan Karang Poh
 - Pembangunan Gedung Type C Kantor Kelurahan Genteng
 - Pemasangan Rangka& ACP (Alumunium Composite Panel) di Sumpat, Driyorejo
 - Proyek Atap & Plafond Jade Hamlet
 - Pemasangan Rangka& ACP (Alumunium Composite Panel) di Kecamatan Sawahan
 - Pekerjaan Plafond di Central Purwosari
 - Pekerjaan Atap Musholla Krembung
 - Pemasangan Rangka& ACP (Alumunium Composite Panel) di Remaja Mart,
Klampis
 - Pekerjaan Atap UPTD Sampang
 - Pekerjaan Atap AN- Nurr
 - Pembangunan Gedung Type B SDN Ketintang II No. 410
 - Pembangunan Gedung SDN Kaliasin, Surabaya
 - Pembangunan Gedung Type B DinasSosial
 - Pemasangan Rangka& ACP (Alumunium Composite Panel) di Realfood Mulyo
Agung, Bojonegoro
 - Pemasangan Rangka& ACP (Alumunium Composite Panel) di Realfood Balen,
Bojonegoro
 - Proyek Rehabilitasi Kamar Mandi UNAIR Gedung A Fak. Hukum UNAIR Kampus B

- 
- Pembangunan Gedung SD AL ISLAH Surabaya
 - Pembangunan Gedung SMP AL ISLAH Surabaya
 - Pekerjaan Kontruksi Atap Baja Krematorium di Keputih Surabaya
 - Pekerjaan Atap SDN Kalmpis Ngasem
 - Instalasi Rising Bollard BCA Graha Asia Surabaya
 - Pekerjaan Area Parkir Universitas Malang – Ambarawa
 - Pekerjaan Baja Gelanggang Remaja Surabaya
 - Pekerjaan Baja dan Sipil Gudang PELINDO III
 - Pekerjaan Atap Bandara Kol Ra Seluwing, Malinau , Kalimantan
 - Pekerjaan Baja Struktur KAI Makassar , Pare-pare

STRUKTUR ORGANISASI



PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
NERACA
Per 31 Desember 2019

Kode Akun	Nama Akun		
1	AKTIVA		
1001	Kas	587,621,732.03	
1002	Kas Bank	48,689,396.39	
1003	Piutang Usaha	212,218,893.54	
1004	Piutang Karyawan	54,750,000.00	
1101	Aktiva Tetap	93,051,540.00	
1102	Akumulasi Penyusutan	(18,836,174.14)	
1113	PAJAK		
111301	PPH PS 4(2)	-	
111302	PPH PS 22	-	
111303	PPH PS 25	-	
111304	PPN MASUKAN	225,970,479.00	
TOTAL AKTIVA			1,203,465,866.82
2	KEWAJIBAN		
2001	Hutang Usaha	-	
2002	PPN KELUARAN	241,461,185.00	
Jumlah Kewajiban			241,461,185.00
3	EKUITAS		
310101	MODAL USAHA	962,004,681.82	
Jumlah Ekuitas			962,004,681.82
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS			1,203,465,866.82

Sidoarjo, 28 April 2020
Mengetahui,



M. Bagus iswanto
Direktur



NOTARIS
LENNY HERINA ONG, SH.

Jl. Mangga I / E 218
Kompleks Pondok Tjandra Indah
SIDOARJO
Telp./ Fax (031) 8664495

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Tanggal 28 Oktober 2002
Nomor : C - 1542. HT . 03 . 01 - Th. 2002

Tanggal, 29 Januari 2018
AKTA
Nomor, - 03 -

TURUNAN

AKTA PENDIRIAN PERSEHOAN TERBATAS

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

LENNY HERINA ONG, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI "

Nomor : 03.

- Pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), -----
hari Senin, tanggal 29-01-2018 (duapuluh sembilan Januari duaribu delapan belas) -----
sampai dengan selesai dibacakan dan ditandatangani akta ini. -----

- Menghadap kepada saya, LENNY HERINA ONG, Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, --
dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang nama - namanya akan disebutkan -----
dibagian akhir akta ini dan dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. Tuan **MOCHAMAD BAGUS ISWANTO**, Sarjana Teknik, -----

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Sidoarjo, pada tanggal 19-01-1985 -----
(sembilan belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Swasta, -----
bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Graha Asri Sukodono Blok A Nomor 20, -----
Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 009, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono ; --
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515141901850001 ; -----

2. Tuan **SUWARTO**, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Surabaya, -----

pada tanggal 09-11-1963 (sembilan Nopember seribu sembilan ratus enampuluh tiga),-
Swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Karangnongko, -----
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono ; --
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515140911630001 ; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama - ---
sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagai berikut : ---

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

P a s a l 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama " **PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI** ", -----
berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disebut " Perseroan "). -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, -----



dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

P a s a l 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

P a s a l 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----

a. Pembangunan ; -----

b. Perdagangan ; -----

c. Jasa ; -----

d. Perindustrian ; -----

e. Perbengkelan ; -----

f. Pengangkutan Darat ; -----

g. Pertanian ; -----

h. Percetakan ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan --
kegiatan usaha, antara lain : -----

a. 1). Menjalankan usaha - usaha dibidang Pembangunan ; -----

2). Bertindak sebagai Pengembang ; -----

3). Pemborongan pada umumnya (General Contractor) ; -----

4). Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, Dermaga ; -----

5). Pemasangan Instalasi - Instalasi ; -----

b. 1). Menjalankan usaha - usaha dibidang Perdagangan (General Trading) -----

antara lain tetapi tidak terbatas pada Barang - Barang Elektrikal dan Mekanikal, --

Alat Tulis Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Meubel, Peralatan Olahraga, -----

Alat Kesehatan, Obat - Obatan, Kosmetik, Makanan, Minuman, Pakaian, Sandal, -

Sepatu, Kerajinan Tangan, Bahan - Bahan Bangunan ; -----

2). Eksport - Import dan Perdagangan antar pulau / daerah serta lokal, -----

untuk barang - barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain ;

3). Perdagangan Besar Lokal ; -----

LENNY HERINA ONG, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

4). Bertindak sebagai Agen, Grosir, Distributor, Supplier, Leveransir, Waralaba -----
dan Commission House dari badan - badan perusahaan lain, -----
baik dari dalam maupun luar negeri ; -----

c. Menjalankan usaha - usaha dibidang Jasa, kecuali jasa dibidang hukum dan pajak --
antara lain tetapi tidak terbatas pada Jasa Pengadaan Barang -----
antara lain Pengadaan Suku Cadang Otomotif Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat),-
Barang - Barang Elektronik seperti Komputer, Laptop dan sejenisnya, -----
Alat - Alat Pertanian, Hand Tractor ; -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, -----
serta memasarkan hasil - hasil produksinya ; -----

e. 1). Menjalankan usaha - usaha dibidang Perbengkelan ; -----

2). Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Suku Cadang Otomotif Roda 2 (dua) -
dan Roda 4 (empat) ; -----

3). Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat - Alat Berat ; -----

f. 1). Menjalankan usaha - usaha dibidang Transportasi ; -----

2). Transportasi Penumpang dan Pengangkutan ; -----

3). Ekspedisi dan Pergudangan ; -----

g. 1). Menjalankan usaha - usaha dibidang Pertanian ; -----

2). Peternakan ; -----

3). Perikanan Darat / Laut dan Pertambakan ; -----

4). Perkebunan Tanaman Pangan ; -----

5). Kehutanan ; -----

h. 1) Menjalankan usaha dalam bidang percetakan pada umumnya, -----

baik percetakan Buku - Buku, Brosur, Dokumen, Majalah dan Tabloid ; -----

2). Penjualan, Penerbitan Buku - Buku, Kartonage dan Pengepakan ; -----

3). Desain dan Cetak Grafis, Offset, Sablon, Fotocopy ; -----

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), -----
terbagi atas 3.000 (tigaribu) saham, setiap saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 -

(satu juta rupiah),

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 750 (tujuhratus limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuhratus limapuluh juta rupiah) oleh para pendiri, dengan perincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada sebelum bagian akhir akta ini, ---
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, ---
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan Perseroan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian secara seimbang (proporsional) dengan jumlah saham yang dimiliki, baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya. ---
5. Jika jangka waktu penawaran selama 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham itu kepada pihak ketiga. ---

S A H A M

P a s a l 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. ---
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan / atau Badan Hukum Indonesia. ---
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan antara lain dapat berbentuk resepis, catatan atau kutipan dari buku daftar saham, akta notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham. ---
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. ---
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ---

LENNY HERINA ONG, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang - kurangnya : -----

- a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. nomor surat saham ; -----
- c. nilai nominal saham ; -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang - kurangnya : -----

- a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
- b. nomor surat kolektif saham ; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
- d. nilai nominal saham ; -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur -----
dan seorang Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat saham -----
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimusnahkan -----
dan dibuat berita acara oleh Direksi -----
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan disertai jaminan yang dipandang perlu -----
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, -----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti -----
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 -----

pasal ini mutatis - mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. --

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang - undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari penyelenggaraan Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS Tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan.

LENNY HERINA ONG, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisari atas pengawasan -----
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. --

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu - waktu berdasarkan kebutuhan -----
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat, -----
kecuali mata acara Rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b pasal ini, ---
dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- P a s a l 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan -----
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada -----
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari -----
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, -----
tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. ---

- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
harus mencantumkan waktu, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan -----
mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----

- Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili -----
dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta ----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang -
Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. ---

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----

6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -----

- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
 RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang hadir dalam RUPS. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----
 yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
 RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab -----
 apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang -
 yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----
9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara -----
 Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda - tangani oleh Ketua Rapat -----
 dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh -----
 dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut -----
 menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga -----
 tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
10. Penanda - tangan yang dimaksud dalam ayat 9 pasal ini tidak disyaratkan -----
 apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **P a s a l 1 0** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan -----
 dalam Undang - Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -----
 yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lainnya dilakukan secara lisan, --
 kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain -----
 tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. -----
3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung -----
 dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
 atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS -----
 sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang. -----
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----

LENNY HERINA ONG, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

RUPS dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis -----
dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --
secara tertulis serta menanda - tangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

DIREKSI -----

P a s a l 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi --
atau lebih. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Direksi hanya Warga Negara Indonesia -
yang memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku. -----
3. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya -----
dapat diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan yang lain sebagai Direktur. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu - waktu. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota -----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan --
harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----
ketentuan peraturan perundang - undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -----
maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris -----
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan --
secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7 ; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan ; -----
 - c. meninggal dunia ; -----

d. dihentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

P a s a l 1 2

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

P a s a l 1 3

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh dan / atau atas permintaan tertulis dari :
 - a. seorang anggota Direksi atau lebih ;
 - b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih ; atau ;
 - c. seorang pemegang saham atau lebih yang bersama - sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak

LENNY HERINA ONG, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

- untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat -----
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi -----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan
Rapat, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan
Rapat. -----
5. Rapat Direksi diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan -----
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diselenggarakan dimanapun juga ---
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi -----
yang dipilih oleh dan diantara semua anggota Direksi yang hadir. -----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi -----
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
11. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, -----
ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
- 12.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -----
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. --
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -----
tanpa ditandatangani, sedangkan pemungutan suara mengenai hal - hal lain -----

dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah
dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi,
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu - waktu.
4. Jika oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka -
waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS -
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -
sekurang - kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan

..... dalam peraturan perundang - undangan ;

c. meninggal dunia ;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain - lain -
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak
mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris
diwajibkan mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
Dewan Komisaris yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu
apabila dipandang perlu :
- a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ;
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Direksi atau ;
- c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham
yang bersama - sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris. -

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat -----
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan -----
Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat --
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan -----
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun ---
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama --
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -----
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris -----
hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan Musyawarah -----
untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan ---
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara setuju dan yang tidak setuju berimbang, -----
Ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara-
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain -----
yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup ----
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal - hal lain -----

LENNY HERINA ONG, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan --
dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah ----
dan dianggap tidak ada -----

serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa Rapat Dewan --
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda - tangani persetujuan --
tersebut, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang --
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. --

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- P a s a l 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan --
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. --
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan -----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. --
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari -----
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantor Perseroan -----
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- P a s a l 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca -----
dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan -----
dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya -----
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan -----

untuk cadangan diputus oleh RUPS. -----

3. Dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, maka laba bersih -- setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang - Undang ----- dan anggaran dasar Perseroan dibagikan sebagai dividen. -----
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian ----- yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ----- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ----- selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

----- DIVIDEN INTERIM -----

----- P a s a l 19 -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang - undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila : --
 - a. Jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil ----- daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. -----
 - b. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu ----- atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya ----- kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. -----
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi ----- setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris ----- dengan memperhatikan ketentuan ayat 1a dan 1b tersebut diatas. -----
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, ----- dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham ----- kepada Perseroan. -----
4. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng ----- atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan -- dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- P a s a l 20 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) --

LENNY HERINA ONG, S.H.
NOTARIS SIDOARJO

- dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan
untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat ---
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan
untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola ---
oleh dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,
agar memperoleh laba, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
dan memperhatikan peraturan perundang - undangan

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **P a s a l 21** -----

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum pada ayat (2) pasal ini, ---
terhadap Perseroan ini bertaku Undang - Undang tentang Perseroan Terbatas
dan peraturan perundang - undangan lainnya, sepanjang tidak atau belum diatur ---
secara tersendiri dalam Anggaran Dasar ini.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,
akan diputus dalam RUPS.
- Akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :
- I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai -----
melalui Kas Perseroan oleh para pendiri :
- a. **Tuan MOCHAMAD BAGUS ISWANTO, Sarjana Teknik** tersebut, sejumlah 500 ----
(limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 500.000.000,00**
(limaratus juta rupiah),
- b. **Tuan SUWARTO** tersebut, sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 250.000.000,00**
(duaratus limapuluh juta rupiah).
- Sehingga seluruhnya berjumlah 750 (tujuhratus limapuluh) saham, -----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 750.000.000,00**
(tujuhratus limapuluh juta rupiah).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 14 ayat 3 -----

Anggaran Dasar ini yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

a. Anggota Direksi : -----

Direktur : Tuan **MOCHAMAD BAGUS ISWANTO**, -----
Sarjana Teknik, tersebut ; -----

b. Anggota Dewan Komisaris : -----

Komisaris : Tuan **SUWARTO** tersebut ; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh -----
masing - masing yang bersangkutan. -----

- Selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak sebagaimana diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi, -----

baik sebagian maupun seluruhnya kepada saya, Notaris ; -----

khusus -----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan pengesahan atas -----
Perseroan Terbatas **PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI** -----

yang didirikan berdasarkan akta ini kepada instansi yang berwenang -----
(Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) ; -----

- Apabila dalam rangka memperoleh pengesahan tersebut diperlukan / disyaratkan -----
adanya perubahan atas akta pendirian Perseroan Terbatas **PT. ALKANTARA JAYA** -----

KONSTRUKSI yang termuat dalam akta ini, maka para penghadap (pendiri) yang masih
tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas memberi kuasa dengan hak substitusi -----

kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama pemberi kuasa (pendiri) -----
dalam mengadakan perubahan atas akta pendirian dimaksud. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, -----
dengan dihadiri oleh : -----

- **MARITTA YUNANTI**, dilahirkan di Sidoarjo, pada tanggal 14-03-1996 -----
(empatbelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), -----

bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Mawar Nomor 17 A, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan ; -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515165403960002 ; -----

- HARRIS CHRISTIANTO SANTOSO, dilahirkan di Surabaya, -----

pada tanggal 18-01-1990 (delapanbelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh), --

bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Aster AH / 9, Wisma Tropodo, -----

Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 003, Desa Tropodo, Kecamatan Waru ; -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515181801900006 ; -----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi - saksi. -----

- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada para penghadap -----

dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -----

saksi - saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

- Dilangsunikan dengan tanpa penambahan, tanpa pencoretan serta tanpa penggantian.-

- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 84.349.180.4-603.000
PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

KAV. INDUSTRI RT. 003 RW. 001
KEBONAGUNG, SUKODONO
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR

KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT
JL. LINGKAR BARAT GELORA DELTA, SIDOARJO
TELEPON 031 -8959700 FAKSIMILE 031 -8959800 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-777PKP/WPJ.24/KP.0103/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 84.349.180.4-603.000
2. Nama : PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 41020 - PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI
PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
4. Alamat : KAV. INDUSTRI RT. 003 RW. 001
KEBONAGUNG SUKODONO
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 8 November 2018.

Sidoarjo, 8 November 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



ELMARSYAH HRP
NIP.196210261985031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT
JL. LINGKAR BARAT GELORA DELTA, SIDOARJO
TELEPON 031-8959700 FAKSIMILE 031-8959800 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-777PKP/WPJ.24/KP.0103/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 84.349.180.4-603.000
2. Nama : PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 41020 - PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI
PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
4. Alamat : KAV. INDUSTRI RT. 003 RW. 001
KEBONAGUNG SUKODONO
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 8 November 2018.

Sidoarjo, 8 November 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,




ELMARSYAH HRP

NIP.196210261985031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT
JL. LINGKAR BARAT GELORA DELTA, SIDOARJO
TELEPON 031 -8958700 FAKSIMILE 031 -8959800 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-3264KT/WPJ.24/KP.0103/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 84.349.180.4-603.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 41020 - PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
4. Alamat : KAV. INDUSTRI RT. 003 RW. 001
KEBONAGUNG, SUKODONO
KAB. SIDOARJO JAWA TIMUR
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 19 Maret 2018
7. Kewajiban Pajak :

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
PPN:	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 19 Maret 2018.

Sidoarjo, 19 Maret 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan


ELMARSYAH HRP
NIP.196210261985031001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA KEBONAGUNG
Jalan Raya Kebonagung No. 01
SIDOARJO

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No. : 145 / 65 / 438.7.10.1 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Sarli Maryono
Jabatan : Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI benar-benar berdomisili di Kav.
Industri RT 03 RW 01 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebonagung, Tgl, 30-01-2018
Kepala Desa
An...
Sekretariat Desa Kebonagung

SARLI MARYONO





LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : **0638692**

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI, PT**
 Nama Pimpinan / PJBU : **MOCH. BAGUS ISWANTO. ST**
 Alamat Badan Usaha : **Kav. Industri RT.3 RW.1 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono**

Kabupaten / Kota : **Kab. Sidoarjo**
 Provinsi : **Jawa Timur**
 No. Telepon : **0318832843**
 E-mail :
 NPWP : **84.349.180.4-603.000**
 Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
 Sifat Usaha : **Umum**
 Kekayaan Bersih : **Rp 1.000.000.000**

Kodepos : **61258**
 No. Fax :



Nomor Registrasi : **0 - 3515 - 06 - 174 - 1 - 13 - 089045**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini. Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 15 Agustus 2018 berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 14 Februari 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 14 Februari 2021



Ditetapkan di **Surabaya**
 Pada Tanggal **15 Agustus 2018**
 Badan Pelaksana
 LPJK Provinsi Jawa Timur

(Signature)
Muhammad Alyas, SH, MH
 Manajer Eksekutif



Keterangan
 1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dibersihkan seluruh nulis kelas bawanya atau dir
 2. Data yang tertera dalam SKU ini dapat dilubangi melalui www.lpj.net

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI, PT**
 Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**
 Kualifikasi Bidang Usaha : **Memengah**
 Anggota Asosiasi : **PERKOPINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-




AMIRUL SANTOSO, ST
 Ketua Umum

Keterangan:
 Data yang tertera dalam SBU ini dapat diandalkan melalui www.tpk.net



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor : **0638693**

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI, PT**
Nama Pimpinan / PJBU : **MOCH. BAGUS ISWANTO. ST**
Alamat Badan Usaha : **Kav. Industri RT.3 RW.1 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono**

Kabupaten / Kota : **Kab. Sidoarjo**
Provinsi : **Jawa Timur**
No. Telepon : **0318832843**
E-mail :
NPWP : **84.349.180.4-603.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Umum**
Kekayaan Bersih : **Rp 1.000.000.000**

Kodepos : **61258**

No. Fax :

Nomor Registrasi : **0 - 3515 - 07 - 174 - 1 - 13 - 089045**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 15 Agustus 2018 berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 14 Februari 2020 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 14 Februari 2021



Ditetapkan di
Pada Tanggal

Surabaya
15 Agustus 2018

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Jawa Timur

Mengetahui

1. Sertifikat ini milik LPJK. Harap diwartakan sebelum habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBJ ini dapat dikalibrasi melalui www.lpjk.net

Muhammad Alyas, SH, MH
Manajer Eksekutif



**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI, PT**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Menengah**
Anggota Asosiasi : **PERKOPINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	BG003	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	-	-
2	M1	BG004	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	-	-
3	M1	BG007	Jasa Pelaksanaan Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	-	-




AMIRUL SANTOSO, ST
Ketua Umum



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004689.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI**

1. Modal Dasar : Rp. 3.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 750.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MOCHAMAD BAGUS ISWANTO, SARJANA TEKNIK	DIREKTUR	-	500	Rp. 500.000.000
SUWARTO	KOMISARIS	-	250	Rp. 250.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0013045.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 30 Januari 2018



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004689.AH.01.01.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LENNY HERINA ONG, SH, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat oleh LENNY HERINA ONG, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI tanggal 30 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018013035104869 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI - yang berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 03 Tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat oleh LENNY HERINA ONG, SH, yang berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0013045.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 30 Januari 2018



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120006512692

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
Alamat Kantor/Korespondensi	: KAV. INDUSTRI, Kel. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
NPWP	: 84.349.180.4-603.000
Nomor Telepon	: 031-8832843
Nomor Fax	: 031-8832843
Email	: m.bagus_pkj@yahoo.co.id
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Mei 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 17 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120006512692**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
2	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
3	42114	KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL
4	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
5	47794	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA
6	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
7	41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 17 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
Nomor Induk Berusaha : 9120006512692
Alamat Kantor / Korespondensi : KAV. INDUSTRI, Kel. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
Kode KBLI : 47794
Nama KBLI : PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA
Nomor Proyek : 202001-0800-4039-6461-446
Lokasi Usaha : kav. industri bogem kebonagung, Kel. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 29 Mei 2019



Dicetak tanggal : 17 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapaian Umum)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapaian Umum kepada:

Nama Perusahaan : PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
Nomor Induk Berusaha : 8120109842499
Alamat Perusahaan : KAV. INDUSTRI
Nama KBLI : KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL
Kode KBLI : 42114
Lokasi Usaha
- Alamat : KAV. INDUSTRI 003/001
- Desa/Kelurahan : Kebonagung
- Kecamatan : Sukodono
- Kabupaten/Kota : Kab. Sidoarjo
- Provinsi : Jawa Timur

Izin Usaha berupa Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapaian Umum ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 29 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Konstruksi)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Perusahaan : PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
Nomor Induk Berusaha : 9120006512692
Alamat Kantor / Korespondensi : KAV. INDUSTRI, Kel. Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Mei 2019



Dicetak tanggal : 17 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
Nomor Induk Berusaha : 9120006512692

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Bupati Kab. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	KBEL 42114 - KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL Nomor Proyek: 202001-0800-4039-6305-533	KAV INDUSTRI BOGEM KEBONAGUNG Kel. Pekarangan Kec. Sukodono Kab.Kota. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
	Nama Usaha : -		
2	Bupati Kab. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	KBEL 42113 - KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG Nomor Proyek: 202001-0800-4039-6175-454	KAV INDUSTRI BOGEM KEBONAGUNG Kel. Pekarangan Kec. Sukodono Kab.Kota. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
	Nama Usaha : -		
3	Bupati Kab. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	KBEL 42111 - KONSTRUKSI JALAN RAYA Nomor Proyek: 202001-0800-4039-6025-961	KAV INDUSTRI BOGEM KEBONAGUNG Kel. Pekarangan Kec. Sukodono Kab.Kota. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
	Nama Usaha : -		
4	Bupati Kab. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	KBEL 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL Nomor Proyek: 202001-0800-4039-5897-426	KAV INDUSTRI BOGEM KEBONAGUNG Kel. Pekarangan Kec. Sukodono Kab.Kota. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
	Nama Usaha : -		
5	Bupati Kab. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	KBEL 41016 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN Nomor Proyek: 202001-0800-4039-5747-301	KAV INDUSTRI BOGEM KEBONAGUNG Kel. Pekarangan Kec. Sukodono Kab.Kota. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
	Nama Usaha : -		
6	Bupati Kab. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	KBEL 41013 - KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI Nomor Proyek: 202001-0800-4039-5624-760	KAV INDUSTRI BOGEM KEBONAGUNG Kel. Pekarangan Kec. Sukodono Kab.Kota. Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 29 Mei 2019



Dicetak tanggal : 17 September 2020

Reg.SMK3.2019.SHS.SK-151



Sertifikat Penghargaan Certificate of Appreciation

**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
MANAGEMENT SYSTEM**

Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 33 Tahun 2019

**Menyatakan bahwa
This is to certify that**

Nama perusahaan / Name of company
PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

Alamat / Address
**Kav. Industri RT 3 RW 1, Ds. Kebonagung, Kec Sukodono
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur**

Sektor industri / Sector of industry
JASA KONSTRUKSI

Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Has implemented an Occupational Safety and Health Management System

Hasil pencapaian 87,50% untuk kategori tingkat Awal
Audit result 87.50% for Initial level category

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.
This certificate is valid for 3 (three) years from the date of issue.



Jakarta, 29 Maret 2019
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MINISTER OF EMPLOYMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.

M. HANIF DHAKIRI

CERTIFICATE OF REGISTRATION



This is to certify that the Quality Management System of
PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

Kav. Industri RT.003 RW.001 Desa Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo,
Jawa Timur, Kode Pos 61258

Has Been Assessed and Registered by Sapta
Certification as Conforming to the Requirements of

ISO 9001:2015
For the following Scope

Provision of General Contractor for
Engineering Civil Work for Road Construction (Except the Fly Over), Train Tracks and Aerial Runway,
Warehouse and Industrial Building Construction Services, Construction of Comercial Building, Educational Building
and Construction of Others Building, Services for the Installation of Electric Power for Buildings and Factories
Construction of Health Building, and Galvalum Manufacture.

EA Code	: 28	Planning To be 1st Surveillance	: 26 February 2021
Certificate Number	: SMUQMS/AJK/0583	Planning To be 2nd Surveillance	: 26 February 2022
Issue Date	: 26 March 2020	Planning To be 1st Renewal	: 26 February 2023
Valid Until	: 26 March 2023		


Atah. Signatory

Authorised Signatory
PT. Sapta Mutu Utama - Sapta Certification
Jl. Bintaro Raya No.8, Kby. Lama Utara, Jakarta Selatan,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240
Telp. 021 29054881

Certificate can be verified on website:
www.saptacertification.com or scan QR code



ISO 9001



CERTIFICATE OF REGISTRATION



This is to certify that the Occupational Health and Safety Management System of

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

Kav. Industri RT.003 RW.001 Desa Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo,
Jawa Timur, Kode Pos 61258

Has Been Assessed and Registered by Sapta
Certification as Conforming to the Requirements of

OHSAS 18001:2007

For the following Scope

Provision of General Contractor for
Engineering Civil Work for Road Construction (Except the Fly Over), Train Tracks and Aerial Runway,
Warehouse and Industrial Building Construction Services, Construction of Commercial Building, Educational Building
and Construction of Others Building, Services for the Installation of Electric Power for Buildings and Factories,
Construction of Health Building, and Galvalum Manufacture.

EA Code : 28
Certificate Number : SMUOHS/AJK/0583
Issue Date : 26 March 2020
Valid Until : 26 March 2023

Planning To be 1st Surveillance : 26 February 2021
Planning To be 2nd Surveillance : 26 February 2022
Planning To be 1st Renewal : 26 February 2023


Auth. Signatory

Authorised Signatory
PT. Sapta Mutu Utama - Sapta Certification
Jl. Bintaro Raya No.8, Kby. Lama Utara, Jakarta Selatan,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240
Telp. 021 29054881

Certificate can be verified on website:
www.saptacertification.com or scan QR code



OHSAS 18001



CERTIFICATE OF REGISTRATION



This is to certify that the Environmental Management System of

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

Kav. Industri RT.003 RW.001 Desa Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo,
Jawa Timur, Kode Pos 61258

Has Been Assessed and Registered by Sapta
Certification as Conforming to the Requirements of

ISO 14001:2015

For the following Scope

Provision of General Contractor for
Engineering Civil Work for Road Construction (Except the Fly Over), Train Tracks and Aerial Runway,
Warehouse and Industrial Building Construction Services, Construction of Comercial Building, Educational Building
and Construction of Others Building, Services for the Installation of Electric Power for Buildings and Factories,
Construction of Health Building, and Galvalum Manufacture.

EA Code : 28
Certificate Number : SMUEMS/AJK/0583
Issue Date : 26 March 2020
Valid Until : 26 March 2023

Planning To be 1st Surveillance : 26 February 2021
Planning To be 2nd Surveillance : 26 February 2022
Planning To be 1st Renewal : 26 February 2023


Auth. Signatory

Authorised Signatory
PT. Sapta Mutu Utama - Sapta Certification
Jl. Bintaro Raya No.8, Kby. Lama Utara, Jakarta Selatan,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240
Telp. 021 29054881

Certificate can be verified on website:
www.saptacertification.com or scan QR code



ISO 14001





PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN KEUANGAN

- Neraca
- Laporan Perhitungan Laba (Rugi)
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas

1
2
3
4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Umum
- Kebijakan Akuntansi
- Penjelasan Pos-pos Neraca dan Laba (Rugi)

5
6
9

POSISI KEUANGAN

- Rincian Aset Tetap

13

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI**

Memenuhi kebutuhan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : M. Bagus Iswanto, ST
Alamat Kantor : Kavling Industri RT 03 RW 01 Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo
Jabatan : Direktur

Untuk dan atas nama Direksi dan Komisaris PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI sebagai pihak yang bertanggung jawab menyatakan bahwa:

1. Entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Dengan persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris, Direksi telah memutuskan untuk menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
4. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
5. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara benar dan lengkap. Laporan Keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
6. Telah membuat catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu Perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut telah disimpan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
7. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta sistem pengendalian internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 24 Juni 2020.



(M. Bagus Iswanto, ST)
Direktur

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
NERACA
PER : 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

ASET	CATATAN	2019 Rp	2018 Rp
<u>ASET</u>			
<u>ASET LANCAR</u>			
Kas	3	636.311.128,42	298.250.000,00
Piutang Usaha	2b,4	212.218.893,54	-
Piutang Karyawan	5	54.750.000,00	-
Pajak Dibayar Dimuka	6	225.970.479,00	-
Jumlah Aset Lancar		1.129.250.500,96	298.250.000,00
<u>ASET TETAP</u>			
Nilai Perolehan	2d,7	93.051.540,00	451.750.000,00
Akumulasi Penyusutan		(18.836.174,14)	-
Nilai Buku		74.215.365,86	451.750.000,00
JUMLAH ASET		1.203.465.866,82	750.000.000,00
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>			
<u>KEWAJIBAN LANCAR :</u>			
Hutang Pajak	8	241.461.185,00	-
Jumlah Kewajiban Lancar		241.461.185,00	-
<u>EKUITAS :</u>			
Modal Saham Yang Disetor	9	750.000.000,00	750.000.000,00
Laba (Rugi) Tahun-tahun Lalu		-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		212.004.681,82	-
Jumlah Ekuitas		962.004.681,82	750.000.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.203.465.866,82	750.000.000,00

Direktur



Tuan M. Bagus Iswanto, ST

Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian
 Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
LAPORAN PERHITUNGAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER : 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

KETERANGAN	CATATAN	2019 Rp	2018 Rp
Penjualan	2e.10	2.364.811.850,00	-
Beban Pokok Penjualan	2e.11	(742.416.478,00)	-
Laba (Rugi) Kotor		1.622.395.372,00	-
Beban Usaha	2e.12		
Beban Pemasaran		(878.375.021,50)	-
Beban Administrasi Dan Umum		(489.076.668,68)	-
Jumlah Beban Usaha		(1.367.451.690,18)	-
Laba (Rugi) Usaha		254.943.681,82	-
Pendapatan (Beban) Lain-lain :	2e.13		
Pendapatan Lain-lain		-	-
Beban Lain-lain		(42.939.000,00)	-
Selisih Pendapatan (Beban) Lain-lain		(42.939.000,00)	-
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak		212.004.681,82	-

Direktur



Tuan M. Bagus Iswanto, ST

Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian
 Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

KETERANGAN	MODAL SAHAM	SALDO LABA (RUGI)	JUMLAH
	Rp	Rp	Rp
Saldo 1 Januari 2018	-	-	-
Setoran Modal Saham	750.000.000,00	-	750.000.000,00
Laba (Rugi) Tahun 2018	-	-	-
Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2018	<u>750.000.000,00</u>	<u>-</u>	<u>750.000.000,00</u>
Laba (Rugi) Tahun 2019	-	212.004.681,82	212.004.681,82
Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2019	<u>750.000.000,00</u>	<u>212.004.681,82</u>	<u>962.004.681,82</u>

Catatan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan
 Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
ARUS KAS DARI KEGIATAN USAHA :		
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	212.004.681,82	-
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan kas yang dihasilkan dari kegiatan usaha :		
Penyusutan Aset Tetap	18.836.174,14	-
Penurunan (Kenaikan) Aset Lancar :		
Piutang Usaha	(212.218.893,54)	-
Piutang Karyawan	(54.750.000,00)	-
Pajak Dibayar Dimuka	(225.970.479,00)	-
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lancar :		
Hutang Pajak	241.461.185,00	-
Kas Hasil Kegiatan Usaha	(20.637.331,58)	-
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI :		
Setoran Modal Saham	-	750.000.000,00
Kas Yang Digunakan Untuk Kegiatan Investasi	-	750.000.000,00
ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN :		
Pengurangan Aset Tetap	451.750.000,00	-
Penambahan Aset Tetap	(93.051.540,00)	(451.750.000,00)
Kas Yang Digunakan Untuk Kegiatan Pembiayaan	358.698.460,00	(451.750.000,00)
Penurunan (Kenaikan) Bersih Kas dan Setara Kas	338.061.128,42	298.250.000,00
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	298.250.000,00	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	636.311.128,42	298.250.000,00

Catatan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan
Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

**PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

1 UMUM

a Penjelasan Umum

Aktivitas usaha PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besi, bahan bangunan, alat konstruksi, baja, galvalum, hotdeep, komputer, keselamatan kerja, dan hasil pertambangan.

b Riwayat Perusahaan

PT. ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI (Selanjutnya disebut Perusahaan) didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 07 tertanggal 13 Pebruari 2006 Ratnasari Harwanti, SH , notaris di Gresik. Akta ini telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman nomor AHU-0013045.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 30 Januari 2018.

Perijinan yang dimiliki :

- 1 Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor (NPWP) : 84.349.180.4-603.000
- 2 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tertanggal 30 Mei 2018 nomor : 510/209/438.5.15/2018 (P3) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- 3 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor 13.17.1.46.08263 (P3) tertanggal 30 Mei 2018 dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

c Tempat Kedudukan (Domisili)

Perusahaan berkedudukan (domisili) di Kav. Industri RT. 03, RW. 01 , Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.

d Susunan Pengurus

Berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 3 tertanggal 29 Januari 2018 dari Lenny Herina Ong,SH notaris di Sidoarjo, susunan pengurus adalah sebagai berikut :

JABATAN	NAMA
Direktur	Tuan Mochamad Bagus Iswanto, ST
Komisaris	Tuan Suwanto

**PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

e. Modal Saham

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tertanggal 29 Januari 2018 dari Lenny Herina Ong,SH, Notaris di Sidoarjo, modal dasar perseroan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) , yang terdiri dari 3.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 750.000.000,- [Tujuh ratus lima puluh juta rupiah] atau 750 lembar saham. Susunan kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Saham (Rupiah)
Tuan Mochamad Bagus Iswanto, ST	500	500.000.000,00
Tuan Suwanto	250	250.000.000,00
JUMLAH	750	750.000.000,00

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011. Oleh karena itu laporan keuangan tahun 2019 disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Manajemen perusahaan berpendapat bahwa Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Dasar penyusunan laporan laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas adalah akrual. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Piutang Usaha

Perusahaan tidak menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu. Apabila terdapat piutang usaha yang tidak tertagih, langsung dibebankan ke beban penghapusan piutang usaha dan diklasifikasikan ke dalam beban lain-lain pada laba rugi tahun berjalan.

c. Persediaan

Perusahaan menerapkan SAK ETAP Bab 11 mengenai "Persediaan" termasuk antara lain menggunakan rumus beban yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi bersih adalah harga pendapatan dalam kegiatan usaha normal dikurangi beban penyelesaian dan beban pendapatan

PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

d Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan (at cost) dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	%	Tahun
- Bangunan	5	20
- Inventaris Kantor	25	4
- Peralatan	12,50	8
- Perlengkapan	12,50	8

Pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai biaya dan dibebankan pada periode berjalan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dalam jumlah yang besar dan menambah nilai aset tetap tersebut akan dikapitalisasi.

e Pengakuan pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan, sedangkan beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya (Accrual Basis) pada periode yang bersangkutan.

f Transaksi Valuta Asing

Perusahaan mencatat transaksinya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi selisih kurs dibebankan pada Laba-rugi tahun berjalan.

g Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Karyawan

Perusahaan belum mencadangkan dan membukukan imbalan pasca kerja karyawan tetapnya sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 tentang imbalan pasca kerja. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja didasarkan atas Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

**PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

h Pajak Penghasilan

Perhitungan atas pajak penghasilan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bab 24, bahwa pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama dan dihitung berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak perusahaan merupakan pajak final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2008 dan KMK nomor 635/KMK.04/1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PMK nomor 243/PMK.03/2008.

i Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Perusahaan mempunyai transaksi dengan badan usaha yang dianggap mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 sebagai berikut :

- 1 Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor.
- 2 Perusahaan asosiasi,
- 3 Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut.
- 4 Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manager dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.
- 5 Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4) atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor.

dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

3 KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan saldo kas yang ada di perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
Kas		
- Kas	587.621.732,03	298.250.000,00
Bank		
Bank Jatim	48.689.396,39	-
Jumlah Kas	636.311.128,42	298.250.000,00

4 PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan saldo piutang usaha yang ada di perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
- PT. Dhama	23.155.000,00	-
- PT. DIC Graphics	189.063.893,54	-
Jumlah Piutang Usaha	212.218.893,54	-

5 PIUTANG KARYAWAN

Akun ini merupakan saldo piutang karyawan yang ada di perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
- Reuf	5.752.300,00	-
- Sulaiman	14.898.300,00	-
- Yullanto	3.920.300,00	-
- Nasrun	6.923.600,00	-
- Rizal	5.183.200,00	-
- Cholri	18.072.300,00	-
Jumlah Piutang Karyawan	54.750.000,00	-

PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

6 PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan saldo pajak dibayar dimuka yang ada di perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
- PPN Masukan	225.970.479,00	-
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	225.970.479,00	-

7 ASET TETAP

Akun ini merupakan nilai buku aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
<u>Nilai Perolehan</u>		
- Bangunan Gudang	-	451.750.000,00
- Inventaris Kantor	27.500.000,00	-
- Peralatan	56.182.290,00	-
- Perlengkapan	9.369.250,00	-
Jumlah Nilai Perolehan	93.051.540,00	451.750.000,00
<u>Akumulasi Penyusutan</u>		
- Bangunan Gudang	-	-
- Inventaris Kantor	(8.593.750,00)	-
- Peralatan	(8.778.478,89)	-
- Perlengkapan	(1.463.945,25)	-
Akumulasi Penyusutan	(18.836.174,14)	-
<u>Nilai Buku</u>		
- Bangunan Gudang	-	451.750.000,00
- Inventaris Kantor	18.906.250,00	-
- Peralatan	47.403.811,11	-
- Perlengkapan	7.905.304,75	-
Nilai Buku	74.215.365,86	451.750.000,00

Biaya penyusutan pada tahun 2019 sebesar Rp. 18.836.174,14 dan pada tahun 2018 aset tetap belum di susutkan.

Rincian aset tetap lihat halaman 13.

PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

8 HUTANG PAJAK

Akun ini merupakan saldo hutang pajak per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
- PPN Keluaran	241.461.185,00	-
Jumlah Hutang Pajak	241.461.185,00	-

9 EKUITAS

Akun ini merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
- Modal Saham Yang Disetor	750.000.000,00	750.000.000,00
- Laba Tahun lalu Awal	-	-
- Laba Tahun Berjalan	212.004.681,82	-
Jumlah Ekuitas	962.004.681,82	750.000.000,00

10 PENDAPATAN

Akun ini merupakan jumlah pendapatan perusahaan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
- Pendapatan Jasa	2.364.811.850,00	-
Jumlah Pendapatan	2.364.811.850,00	-

11 BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini merupakan beban pokok penjualan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019 Rp	2018 Rp
- Gaji Harian	5.200.000,00	-
- Gaji Borongan	362.259.333,00	-
- Beban Pembuangan Material	6.500.000,00	-
- Pemakaian Bahan Baku	368.457.145,00	-
Beban Pokok Penjualan	742.416.478,00	-

PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

12 BEBAN USAHA

Akun ini merupakan beban usaha perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019	2018 Rp
<u>BEBAN USAHA</u>		
<u>BEBAN PEMASARAN</u>		
- Beban Fee Kerja Sama	878.375.021,50	-
Jumlah Beban Pemasaran	878.375.021,50	-
<u>BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM</u>		
- Gaji dan tunjangan	80.459.855,46	-
- Beban Operasional	2.874.300,00	-
- Pemeliharaan aset tetap	2.650.000,00	-
- Sewa Kendaraan	4.500.000,00	-
- Beban Konsumsi	9.760.500,00	-
- Tol/parkir/BBM	2.875.614,00	-
- Beban Lain-lain	153.533.397,08	-
- Alat Tulis Kantor	1.058.750,00	-
- Beban Pengobatan Karyawan	300.000,00	-
- Beban Perlengkapan	89.028.078,00	-
- Beban Piutang Tak Tertagih	123.200.000,00	-
- Biaya Penyusutan Aset	18.836.174,14	-
Jumlah Beban Umum Dan Administrasi	489.076.668,68	-
Jumlah Beban Usaha	1.367.451.690,18	-

13 PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN - LAIN

Akun ini merupakan pendapatan dan beban lain-lain di luar usaha untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang terinci sebagai berikut :

KETERANGAN	2019	2018 Rp
<u>Pendapatan Lain-lain</u>		
- Pendapatan Jasa Giro	-	-
Jumlah Pendapatan lain-lain	-	-
<u>Beban Lain-lain</u>		
- Beban PPh 4 (2)	(42.939.000,00)	-
Jumlah Beban Lain-lain	(42.939.000,00)	-
PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH	(42.939.000,00)	-

14 Persetujuan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 24 Juni 2020.



PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
 I DAFTAR ASEI TETAP DAN PENYUSUTANNYA
 PER 31 DESEMBER 2019

No.	URAHAN	TANGHUN PEROLEH	RIKAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2018	PEHALIBAHAI SELAMA TANGHUN 2019	FENGGABIKAN SELAMA TANGHUN 2019	RIKAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2019	AJUKA PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2018	SAVA PENYUSUTAN SELAMA TANGHUN 2019	ASUKA PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2019	RIKAI BUKU PER 31 DESEMBER 2019
I	BERHUBUNGAN L.S.S.1									
-	Bangunan	Jun 2018	451.750.000,00	-	451.750.000,00	-	-	-	-	-
	Jumlah Bangunan		451.750.000,00	-	451.750.000,00	-	-	-	-	-
I	BERHUBUNGAN L.S.S.1									
-	Laptop HP	Jan 2019	-	17.500.000,00	-	17.500.000,00	-	3.446.750,00	6.448.750,00	12.051.250,00
-	Printer	Jan 2019	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	1.562.500,00	1.562.500,00	3.437.500,00
-	Meja Kantor	Jan 2019	-	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	843.750,00	843.750,00	1.856.250,00
-	Kursi Kantor	Jan 2019	-	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	718.750,00	718.750,00	1.581.250,00
	Jumlah Inventaris Kantor		-	27.500.000,00	-	27.500.000,00	-	8.571.750,00	8.571.750,00	18.906.250,00
II	PERALATAN (12,50 %)									
-	Stempel	Jan 2019	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	546.875,00	546.875,00	2.953.125,00
-	Webbing 3kg WLL 314 75 mm x 4 m	Jan 2019	-	189.750,00	-	189.750,00	-	29.644,39	29.644,39	160.105,61
-	Maki DC Arc Welder	Jan 2019	-	31.660.300,00	-	31.660.300,00	-	4.993.794,50	4.993.794,50	26.966.505,50
-	Sel Condrage Huder	Jan 2019	-	2.132.240,00	-	2.132.240,00	-	333.143,00	333.143,00	1.799.097,00
-	Bur Atagnet Kaler	Jan 2019	-	4.400.000,00	-	4.400.000,00	-	467.400,00	467.400,00	3.732.600,00
-	Genet Slant Benda	Jan 2019	-	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	2.187.500,00	2.187.500,00	11.812.500,00
	Jumlah Peralatan		-	56.182.290,00	-	56.182.290,00	-	8.778.476,89	8.778.476,89	47.403.813,11
III	PELENGKAPAN (12,50 %)									
-	Webbing 3kg WLL 314 75 mm x 4 m	Jan 2019	-	189.750,00	-	189.750,00	-	29.644,75	29.644,75	160.105,25
-	Mekan Bar Mogyel	Jan 2019	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	1.375.000,00	1.375.000,00	7.425.000,00
-	Webbing 3kg WLL 314 75 mm x 4 m	Jan 2019	-	379.500,00	-	379.500,00	-	89.296,50	89.296,50	300.203,50
	Jumlah Peleengkapan		-	9.569.250,00	-	9.569.250,00	-	1.463.941,25	1.463.941,25	7.905.308,75
	Jumlah AseI Tetap		451.750.000,00	93.051.540,00	451.750.000,00	93.051.540,00	-	18.936.176,14	18.936.176,14	74.215.344,84



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. Benny & Veto.

Kantor Jl. Serayu No. 2 G Telp. (031) 5671856, 5947148, Fax (031) 5671856 Surabaya

Ijin Kementerian Keuangan
No. 58 / KM.1 / 2011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. : 00062B-PS/11.2.0838/AU.2/03/1653-1/1/VI/2020

Kepada Yth.
Direksi dan Pemegang Saham
PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI
Sidoarjo

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian intern yang menurut manajemen diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami ialah memberi opini atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Suatu audit meliputi pelaksanaan prosedur – prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka – angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian resiko mengenai salah saji yang material dalam laporan keuangan, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan bagi entitas dalam menyusun laporannya. Pertimbangan auditor mengenai pengendalian intern ini adalah merancang prosedur audit yang tepat, namun bukan untuk tujuan memberikan pendapat mengenai efektifnya pengendalian intern suatu entitas. Audit juga meliputi evaluasi mengenai tepatnya kebijakan akuntansi yang digunakan dan kelayakan estimasi akuntansi yang dibuat manajemen, dan evaluasi mengenai penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar memadai pemberian pendapat audit kami.

Dasar pendapat dengan pengecualian

Perusahaan belum menerapkan bab 23 dan bab 24 tentang akuntansi Imbalan Kerja dan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Menurut pendapat kami, penerapan standar akuntansi tersebut diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Pemeriksaan kami tidak meliputi aspek perpajakan karena diluar lingkup penugasan kami dan oleh karenanya kami tidak memberikan pendapat atas kewajiban pajak yang mungkin timbul di kemudian hari.

Opini

Menurut pendapat kami, kecuali dampak tidak disajikannya laporan keuangan sesuai yang diuraikan pada alenia sebelumnya, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan PT ALKANTARA JAYA KONSTRUKSI tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).




Yunita Erawati Salvanti, CPA
AP. 1653

Surabaya, 24 Juni 2020

PEMASANGAN ACP
MINI MARKET “REMAJA MART”
LONTAR SURABAYA



RENOVASI DAN BANGUNAN BARU
SMP AL - ISLAH
SURABAYA



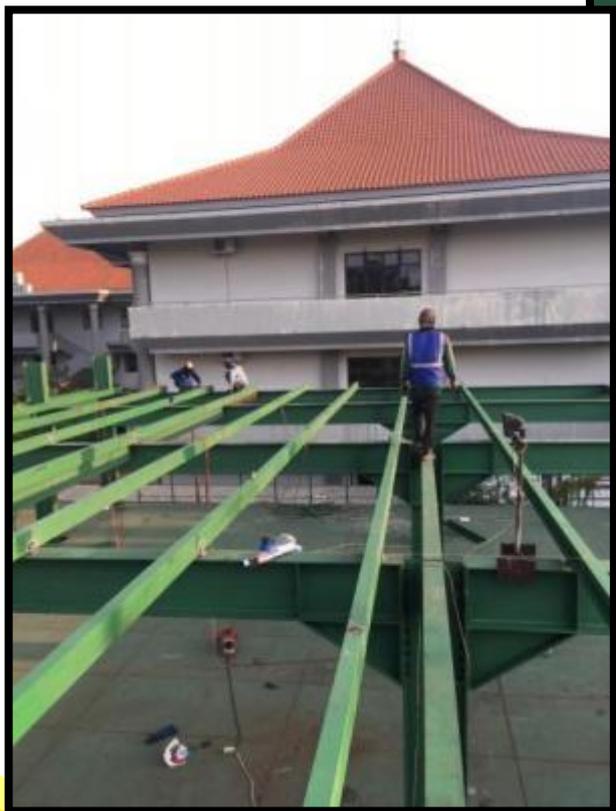
PEMASANGAN ATAP GALVALUM
PERUMAHAN MENGANTI
SURABAYA



INSTALASI RISING BOLLARD
BCA GRAHA ASIA CITRALAND
SURABAYA



PEKERJAAN AREA PARKIR AMBARAWA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MALANG



PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN
GEDUNG AKNL (KOMUNITAS NEGERI LUMAJANG)
JOGOTRUNAN - LUMAJANG



PEMBANGUNAN RENOVASI OFFICE
PT DIC GRAPHIC
MOJOKERTO

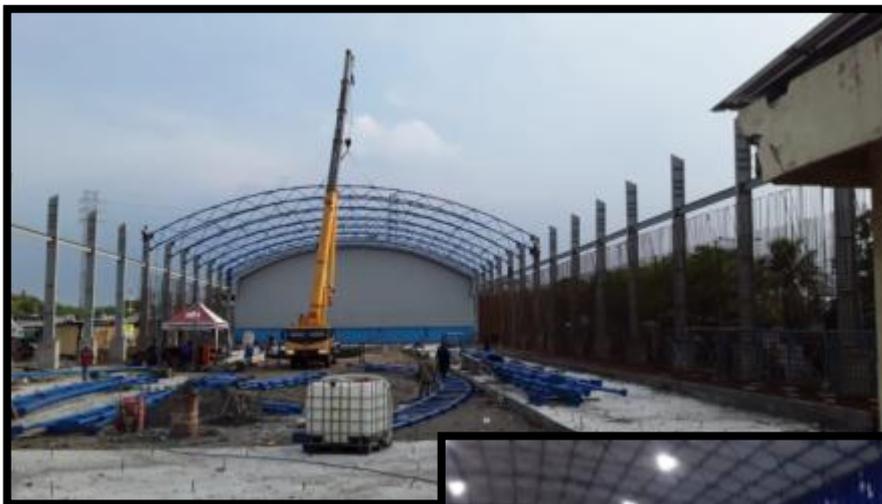


PEMBANGUNAN GEDUNG PERDAGANGAN
PASAR RAKYAT KLOJEN
LUMAJANG



PEMBANGUNAN GUDANG PENYIMPANAN BAHAN BAKU RAW
SUGAR (TAHAP2)

PT. PELINDO III TERMINAL KALIMAS ZONA 3
SURABAYA



PEMBANGUNAN BAJA STRUKTUR
STASIUN KERETA API MAKASSAR, PARE-PARE
SULAWESI SELATAN

